

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Government public relations atau hubungan masyarakat pemerintah merupakan aktivitas kehumasan yang memiliki tujuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, untuk menciptakan pemahaman serta dukungan publik terhadap kebijakan dan program pemerintah. Implementasi humas pemerintah dalam menghubungkan interaksi lembaga dengan publiknya, menjadi bagian dari komunikasi publik yang merupakan fungsi kehumasan. Fungsi kehumasan merupakan salah satu upaya untuk mendukung tercapainya tujuan instansi, seiring dengan kemajuan teknologi digital, implementasi humas pemerintah dalam menjalankan komunikasi publik memanfaatkan media digital sebagai media untuk menyampaikan informasi. Salah satu lembaga pemerintah yang mengimplementasikan peran *government public relations* adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Melalui penggunaan berbagai kanal media, BRIN memiliki tanggung jawab menciptakan komunikasi publik yang efektif dan akurat, terutama pasca integrasi lembaga riset di Indonesia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan lembaga otonom riset nasional hasil integrasi lima lembaga riset di Indonesia diantaranya LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, dan Kementerian Riset dan Teknologi, yang menciptakan transformasi besar seluruh aktivitas riset Nasional Republik Indonesia. Sejak ditetapkannya integrasi BRIN dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, BRIN menghadapi tantangan dalam

mengomunikasikan dan menyampaikan seluruh aktivitas lembaga, terutama untuk memberikan pemahaman terkait peran, fungsi, dan kebijakan baru tentang lembaga. Tantangan ini menjadi bagian dari peran utama humas pemerintah dalam menjalankan fungsi kehumasan yaitu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik, serta transparansi dalam lembaga pemerintah.

Peran *government public relations* mendukung humas BRIN membangun komunikasi publik serta meningkatkan pengenalan lembaga di tengah masyarakat. Berdasarkan data pra penelitian yang diperoleh dari laman resmi brin.go.id pada tahun 2025, Humas BRIN menjelaskan bahwa dalam rentang waktu empat tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden tahun 2021, BRIN mengalami dinamika dan transformasi besar yang mengubah wajah riset dan inovasi di Indonesia. Hal ini mendorong tanggung jawab fungsi kehumasan BRIN yaitu implementasi *government public relations* dalam memastikan seluruh informasi terkait lembaga dikomunikasikan dengan baik melalui kanal media.

Humas pemerintah BRIN tidak hanya berperan dalam mengomunikasikan fungsi lembaga kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada lembaga negara, instansi terkait, serta praktisi maupun akademisi yang belum mengenal identitas lembaga riset nasional yang baru. Hal ini di dukung juga oleh data pra penelitian yang disampaikan Koordinator Komunikasi Publik BRIN, Dyah Rachmawati Sugiyanto kepada humasindonesia.id, bahwa bukan hal yang mudah bagi BRIN membangun komunikasi dan membangun sinergi, karena hingga tahun 2023 BRIN tercatat membawahi setidaknya 210 humas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan koordinator humas pusat dan kawasan BRIN maupun media yang

melakukan kegiatan komunikasi publik, merilis publikasi, mendokumentasi kegiatan, serta kegiatan pewartaan digital terkait lembaga.

Fungsi humas BRIN pasca integrasi lembaga dalam komunikasi publik mengharuskan implementasi *government public relations* yang efektif untuk mencapai tujuan yang ingin lembaga tunjukkan kepada publiknya. Komunikasi publik menjadi salah satu fungsi penting yang harus dijalankan melalui peran humas yang strategis, terlebih informasi yang akan disampaikan oleh humas pemerintah berkaitan dengan segala hal tentang lembaga. Sehingga implementasi tidak hanya menciptakan pemahaman publik, tetapi juga reputasi dan integritas lembaga.

Implementasi peran humas pemerintah BRIN dalam membangun pengenalan lembaga kepada publik menjadi bagian penting dari fungsi kehumasan, terlebih setelah penggabungan lembaga riset di Indonesia. Di tahun ke lima BRIN berdiri, mereka memiliki arah dan fokus dalam bidang digital, tak terkecuali dalam memberikan informasi kepada publik terkait lembaga. Humas BRIN memiliki tanggung jawab dalam memberikan keterbukaan informasi publik di kanal media digital untuk membangun pemahaman antara lembaga dengan masyarakat.

Seiring dengan implementasi peran humas pemerintah dalam komunikasi publik, BRIN memperoleh penghargaan yang menunjukkan komitmen dan profesionalisme humas BRIN dalam menyampaikan informasi terkait lembaga. Berdasarkan data pra penelitian yang diperoleh dari laman resmi brin.go.id pada tahun 2023, BRIN mendapatkan penghargaan dari Anugerah Humas Indonesia (AHI) tahun 2023 sebagai ajang kompetisi kinerja komunikasi dan keterbukaan

informasi kepada lembaga pemerintah atau *government public relations*, perguruan tinggi negeri, korporasi milik negara atau daerah, dan badan layanan umum se-Indonesia. Melalui kegiatan ini BRIN mendapatkan penghargaan untuk kategori ruang pelayanan informasi publik, hal ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen BRIN dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik. BRIN menyampaikan bahwa akan terus mewujudkan keterbukaan informasi publik, dengan menyediakan berbagai kanal informasi publik untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan informasi.

Profesionalisme BRIN dalam komunikasi publik ditunjukkan dengan penyediaan saluran informasi publik seperti *website*, dan media sosial. Implementasi *government public relations* yang dilaksanakan oleh Humas BRIN dibuktikan melalui pengelolaan kanal media yang memiliki tujuan serta fokus yang berbeda. Di antara kanal media yang digunakan oleh BRIN dalam menyampaikan informasi adalah, *website* resmi lembaga brin.go.id yang fokusnya pada transparansi dan kedalaman isi terkait kegiatan yang dilakukan BRIN. Kemudian media sosial seperti Instagram, X, Tiktok, dan Facebook @brin_indonesia yang fokusnya pada edukasi dan informasi terkait riset yang dilakukan BRIN, serta YouTube BRIN untuk menjangkau publik luas melalui program-program yang dikemas dengan menarik dalam bentuk audio visual. Hal ini menunjukkan implementasi humas pemerintah BRIN pasca integrasi lembaga riset telah menyesuaikan diri untuk mencapai kesepahaman lembaga dengan publik.

Implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi humas berupa pelaksanaan komunikasi publik yang transparan atas seluruh

informasi yang berkaitan dengan lembaga, khususnya terkait riset nasional. Komunikasi publik dan transparansi ini dilakukan untuk menunjukkan peran dan posisi BRIN setelah penggabungan sebagai lembaga riset nasional, kepada masyarakat luas. Berdasarkan observasi pra penelitian yang dilakukan pada Januari 2025, humas BRIN memiliki tantangan utama dalam menyampaikan informasi terkait lembaga kepada publik, untuk membangun identitas dan reputasi lembaga pasca integrasi, melalui beberapa kanal media digital.

Komunikasi publik yang merupakan bagian dari fungsi kehumasan diimplementasikan BRIN melalui peran teknis sebagai komunikator pesan, seperti penyusunan *press release* maupun artikel berita yang dipublikasikan melalui *website* resmi lembaga, dan kemudian disebarluaskan melalui media lokal. Berdasarkan data pra penelitian yang diperoleh dari laman resmi brin.go.id pada tahun 2025, yang disampaikan oleh Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas bahwa kunci dalam membangun lembaga yang adaptif di tengah perubahan digital adalah komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Beliau juga menjelaskan bahwa sejak berdirinya BRIN pada tahun 2021, terdapat tantangan besar dalam penyatuan sistem dan budaya kerja. Keterbukaan informasi menjadi modal komunikasi yang efektif, baik melalui kanal kehumasan maupun digital.

Integrasi BRIN menghasilkan inovasi, salah satunya dengan penyediaan berbagai kanal informasi, sehingga aktivitas kehumasan dapat lebih bervariasi dalam merancang komunikasi yang efektif. Peran humas pemerintah BRIN yang menjadi bagian untuk menjalankan fungsi kehumasan salah satunya adalah dengan menjaga hubungan baik bersama media untuk menyebarluaskan pemberitaan yang

lebih dulu telah dipublikasikan oleh humas melalui *website* brin.go.id. Implementasi lainnya ditunjukkan dengan konten yang disajikan di media sosial lembaga, keterkaitan antara tren dengan informasi yang ingin di tunjukkan dikemas dengan menarik, sehingga menciptakan komunikasi publik yang efektif.

Badan Riset dan Inovasi Nasional secara tegas menyampaikan bahwa mereka harus memastikan informasi yang dipublikasikan akurat dan cepat. Berdasarkan data pra penelitian yang disampaikan oleh Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas, pada laman resmi brin.go.id pada tahun 2025, bahwa mereka menekankan jangan sampai publik mengetahui informasi terkait BRIN dari media lain, dan mendahului kanal resmi BRIN itu sendiri. Ia menegaskan bahwa BRIN terus memperkuat peran kehumasan agar setiap isu publik dapat dikonfirmasi dengan cepat dan akurat. Maka dari itu, implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan komunikasi publik menjadi penting, terlebih di tengah banyaknya kebijakan strategis lembaga-lembaga pemerintahan saat ini.

Fenomena ini menciptakan peran humas BRIN yang aktif sebagai penyampai informasi, serta mendukung tercapainya tujuan-tujuan dalam memperkuat komunikasi publik sebagai lembaga riset nasional. Implementasi *government public relations* dalam menjalankan komunikasi publik di era digital semakin penting, karena masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi, sehingga pengenalan peran, fungsi, dan seluruh informasi terkait lembaga dapat disertai dengan kesepahaman dan dukungan publik, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Penelitian tentang implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi lembaga riset nasional, bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi peran humas BRIN, untuk menjalankan fungsi kehumasan. Melalui pelaksanaan peran humas pemerintah yang terstruktur dan saling melengkapi, penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran tersebut dilakukan untuk membangun dan menjalankan komunikasi publik yang efektif untuk memperoleh pemahaman dan kepercayaan publik terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional setelah integrasi.

Fenomena ini memberikan kelebihan dalam penelitian ini untuk dapat melihat peran humas pemerintah diimplementasikan untuk menjalankan fungsi kehumasan seperti komunikasi publik, khususnya untuk membangun dan meningkatkan pemahaman publik terkait kegiatan dan peran BRIN dalam riset nasional pasca integrasi, serta mempertahankan keterbukaan informasi publik, sebagai bagian dari keberhasilan fungsi kehumasan di lembaga pemerintah.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian ditetapkan pada implementasi peran humas pemerintah Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam memperkuat identitas sebagai lembaga riset nasional pasca integrasi melalui komunikasi publik sebagai bagian dari fungsi kehumasan, maka pertanyaan penelitian di antaranya:

- 1) Bagaimana implementasi peran teknisi komunikasi humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi?

- 2) Bagaimana implementasi peran fasilitator komunikasi humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi?
- 3) Bagaimana implementasi peran fasilitator pemecah masalah humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi?
- 4) Bagaimana implementasi peran penasihat ahli humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian yaitu:

- 1) Mengetahui implementasi peran teknisi komunikasi humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi.
- 2) Mengetahui implementasi peran fasilitator komunikasi humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi.
- 3) Mengetahui implementasi peran fasilitator pemecah humas pemerintah BRIN menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi.
- 4) Mengetahui implementasi peran penasihat ahli humas pemerintah BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pada bidang Hubungan Masyarakat, yang berfokus pada peran hubungan masyarakat pemerintah. Melalui kajian implementasi *government public relations* BRIN dalam Menjalankan Fungsi Kehumasan Pasca Integrasi, penelitian ini memperkenalkan pemahaman akademik

mengenai peran humas yang dijalankan oleh humas di lembaga pemerintah yang mengalami proses integrasi lembaga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pentingnya peran humas pemerintah dalam pelaksanaan dan pengelolaan komunikasi publik, dalam membentuk dan menjaga identitas lembaga pemerintah. Kerangka analisis menggunakan konsep 4 peran humas memberikan nilai akademik dengan menghadirkan pendekatan sistematis dalam mengkaji implementasi humas pemerintah dalam menjalankan fungsi kehumasan yaitu keterbukaan informasi atau komunikasi publik melalui kanal media.

Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat memperluas sudut pandang akademik dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, yang membahas tentang *government public relations* di lembaga pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi peran dalam menjalankan fungsi kehumasan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada praktisi Humas di lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi kehumasan melalui implementasi peran Humas pemerintah. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun maupun mengembangkan peran *government public relations* khususnya dalam aktivitas komunikasi publik yang efektif untuk mendukung upaya peningkatan komunikasi publik maupun citra positif terkait lembaga.

Penelitian ini juga dapat memberikan ruang refleksi terhadap implementasi peran humas pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional

(BRIN), dalam membangun dan menjaga identitas serta keterbukaan informasi sebagai lembaga riset nasional pasca integrasi. Melalui pemetaan dan klasifikasi 4 peran humas, penelitian ini membantu dalam menggambarkan kegiatan komunikasi publik yang telah dilaksanakan dan menjadi bagian dari fungsi humas, sehingga dapat dipahami secara sistematis dari sudut pandang kehumasan.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan kerangka penting dalam penelitian untuk memahami dan mengaitkan fenomena dan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan 4 konsep peran humas yang disampaikan oleh Cutlip, Center, & Broom, yang kemudian dikembangkan oleh Broom dan Dozier pada Tahun 1995. Penelitian ini berfokus pada implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi. Sehingga landasan teoritis membantu dalam menyajikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan penelitian yang telah disusun.

Konsep 4 peran *public relations* menjadi kerangka komprehensif untuk memahami implementasi humas pemerintah yang dilaksanakan oleh BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi. Peran *public relations* oleh Broom dan Dozier menjelaskan bahwa untuk mendeskripsikan praktik fungsi kehumasan, terdapat empat peran utama humas diantaranya, Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*), Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*), Fasilitator Pemecah Masalah (*Problem Solving Facilitator*), dan Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*).

1) Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*)

Peran hubungan masyarakat (humas) sebagai teknisi komunikasi artinya humas sebagai pihak yang memproduksi dan mengomunikasikan segala informasi terkait lembaga kepada publik, melalui berbagai media yang sesuai dengan arahan manajemen atau kebijakan lembaga. Implementasi peran humas ini artinya harus memiliki keahlian dalam pengelolaan media, ditunjukkan dengan aktivitas seperti menulis *press release*, mengembangkan isi web, dan menangani kontak media.

Pada konteks penelitian ini, peran teknisi komunikasi bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi *government public relations* BRIN dalam menyusun dan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh publik. Kemudian, untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui *website* resmi dan media sosial, akurat dan mudah dipahami, khususnya dalam memperkuat identitas dan citra positif BRIN pasca integrasi.

2) Fasilitator Komunikasi (*Communication Facilitator*)

Peran hubungan masyarakat (humas) sebagai fasilitator komunikasi artinya praktisi Humas sebagai pendengar, jembatan komunikasi, pun mediator antara lembaga dengan publiknya. Humas menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan, dengan menjaga hubungan serta saluran komunikasi tetap lancar. Penyampaian informasi harus akurat dan transparan, peran humas disini juga berfokus dalam memantau dan menerima masukan serta kritik dari publik, yang kemudian disampaikan kembali kepada manajemen. Selain itu, peran humas menjadi mediator atau penengah ketika terjadi perbedaan pandangan antara lembaga dengan publiknya.

Pada konteks penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran fasilitator komunikasi dijalankan pada implementasi *government public relations* BRIN dalam mendengar, menjembatani, dan menjadi penengah komunikasi antara lembaga dengan publiknya. Humas menjadi pendengar terkait kebutuhan maupun keluhan publik yang berkaitan dengan lembaga, kemudian humas harus mampu menyampaikan kembali kebijakan maupun hal lain yang berkaitan dengan lembaga kepada publiknya, terlebih pasca integrasi. Peran ini menjembatani komunikasi dua arah antara lembaga dengan publiknya dengan informasi yang jelas dan akurat.

3) Fasilitator Pemecah Masalah (*Problem Solving Facilitator*)

Peran hubungan masyarakat sebagai fasilitator pemecah masalah dalam mendefinisikan persoalan yang terjadi. Humas berperan untuk menganalisis situasi sebagai penasihat dalam membantu pimpinan melakukan pemecahan masalah, maupun pengambilan keputusan langsung melalui aktivitas kehumasan dalam upaya mengatasi persoalan.

Pada konteks penelitian ini, peran fasilitator pemecah masalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *government public relations* BRIN dapat mengidentifikasi persoalan yang sedang terjadi terkait kebijakan dan informasi terkait lembaga, melakukan analisis, dan merumuskan solusi yang tepat sehingga pihak manajemen dapat menerima dan yakin dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

4) Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*)

Peran hubungan masyarakat sebagai penasihat ahli bertugas dalam menangani keluhan atau umpan balik negatif terkait lembaga, melalui

pengembangan program setelah mendefinisikan isu atau keluhan. Humas bertanggung jawab sebagai jembatan penghubung antara lembaga dengan publiknya, dengan memastikan setiap isu ditangani dengan cepat dan tepat, melalui strategi komunikasi yang efektif. Serta memberikan solusi terbaik untuk merespons isu agar hubungan baik antara lembaga dengan publiknya tetap terjaga.

Pada konteks penelitian ini, peran penasihat ahli bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *government public relations* BRIN dijalankan dalam memberikan solusi dan rekomendasi terkait tindakan yang perlu diambil terhadap isu yang terjadi, khususnya terkait kebijakan dan aktivitas lembaga pasca integrasi. Pengambilan strategi komunikasi ini akan berpengaruh langsung pada citra lembaga jika tidak ditangani dengan tepat.

1.5.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian mengenai implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi lembaga, telah disesuaikan dengan kebutuhan penulis untuk menganalisis pertanyaan penelitian.

1) Hubungan Masyarakat Pemerintah

Humas Pemerintah merupakan representasi dari suatu instansi atau lembaga melalui pemberian informasi, penjelasan mengenai kebijakan, dan menjaga hubungan baik dengan internal dan eksternal lembaga terkait. Peran humas dalam suatu lembaga bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik, dan mengetahui pandangan publik mengenai lembaga tersebut.

Menurut Suprawoto (2018:48) humas pemerintah atau *government public relations* merupakan penggabungan dua kata yaitu humas dan pemerintah. Batasan humas pemerintah adalah sebagai fungsi manajemen yang membantu merumuskan tujuan organisasi, serta berperan sebagai mata dan telinga organisasi, yang akan menjadi evaluasi keberlanjutan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa humas pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi terkait kebijakan, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan pada organisasi pemerintah yang memengaruhi pandangan publik.

2) Fungsi Hubungan Masyarakat

Humas atau Hubungan Masyarakat merupakan kegiatan komunikasi yang menjadi bagian dari fungsi manajemen, dengan tujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dalam lingkup organisasi maupun dengan pihak eksternal, sehingga dapat memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Oleh karena itu, humas memiliki fungsi timbal balik, baik ke dalam maupun ke luar, artinya humas harus selalu berusaha mengidentifikasi hal-hal terkait organisasi, yang kemudian akan berpengaruh pada tumbuhnya sikap dan *image* positif publik terhadap segala aktivitas dan kebijakan organisasi.

Rachmadi (1993:21) menyatakan bahwa secara umum fungsi humas adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga dengan publiknya, dengan tujuan memberikan pengertian, menanamkan motivasi dan partisipasi publik, sebagai upaya menciptakan opini publik dalam membentuk citra lembaga. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa fungsi humas memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan tujuan organisasi, karena melalui

komunikasi dua arah yang harmonis akan menciptakan pemahaman dan dukungan publik. Serta, pembentukan opini publik yang positif akan mendukung citra organisasi.

3) Integrasi Organisasi

Integrasi merupakan proses menyatukan atau menggabungkan berbagai unsur lembaga yang terpisah menjadi satu kesatuan yang saling terkait, melalui penyesuaian dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Diana (2015) menjelaskan, integrasi atau pengintegrasian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, dengan tujuan terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan. Maka, integrasi yang baik tidak hanya menyatukan kepentingan, tetapi berupaya mencapai tujuan bersama dan keselarasan hubungan kerja antara organisasi dengan pegawainya.

Integrasi organisasi menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia yang memiliki peran penting dan memiliki tantangan yang cukup sulit, karena harus menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan kebutuhan serta mengukur keberhasilan dan kegagalan dari hasil penggabungan. Menurut Norawati dan Nurmansyah (2025:76), upaya integrasi lembaga artinya juga menyelaraskan kepentingan berbagai suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan optimal. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa proses integrasi atau restrukturisasi suatu organisasi harus menciptakan kondisi kerja yang kooperatif sehingga optimal untuk mencapai tujuan bersama.

1.6 Langkah - Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor pusat Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, yang berlokasi di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta. Peneliti melakukan penelitian di kantor pusat dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data yang akan mendukung proses penelitian. Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian hasil integrasi, menjalankan peran kehumasan untuk mengomunikasikan seluruh informasi terkait lembaga, serta bertanggung jawab dalam mengimplementasikan peran *government public relations*, untuk membangun identitas dan reputasi BRIN di tengah publik.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

1) Paradigma

Paradigma merupakan penerapan dari pandangan peneliti dalam penelitian, untuk mengamati realitas dan fenomena sosial. Menurut Denzin & Lincoln (2005:183), paradigma merupakan cara pandang atau sekumpulan keyakinan mendasar, yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penelitian. Paradigma berfungsi sebagai kerangka acuan peneliti untuk mengidentifikasi fakta melalui proses penelitian.

Paradigma pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik merupakan paradigma yang melihat suatu realitas atau fakta dari fenomena sosial akan dibentuk oleh berbagai macam konstruksi sosial. Pujileksono (2015:26) menjelaskan bahwa paradigma merupakan satu set

asumsi, konsep, nilai-nilai dan praktik, dan cara pandang realitas dalam disiplin ilmu, yang dikaji dan diteliti untuk dicari pemecahan persoalannya.

Paradigma adalah cara pandang atau pola pikir dalam ilmu pengetahuan atas peristiwa, yang diteliti, dikaji, dipelajari, dipahami, dan untuk dicari pemecahan persoalannya. Paradigma tidak membahas salah dan benar, tetapi untuk memberikan manfaat atau kurang bermanfaat atas cara pandang terhadap sesuatu. Paradigma konstruktivisme dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati dan menjelaskan realitas sosial sebagai data penelitian. Penelitian ini berupaya menelusuri pemahaman subjektif yang dimiliki oleh tiap individu.

Pada paradigma konstruktivistik, jarak antara peneliti dengan objek penelitian tidak terlalu dekat, artinya peneliti dapat menyesuaikan diri pada saat mempelajari dan memahami subjek yang akan diteliti. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana fungsi humas yaitu komunikasi publik sebagai bagian dari implementasi peran *government public relations*, oleh karena itu penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik untuk memahami peran humas pemerintah BRIN dalam mengomunikasikan informasi terkait lembaga, pasca integrasi lembaga riset di Indonesia.

2) Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena, yang diperoleh dari catatan lapangan, dengan menyajikan data dalam bentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata. Bogdan dan Taylor (2016:7) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan perilaku yang diamati.

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari pengumpulan data-data melalui proses wawancara dan observasi, yang kemudian di analisis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan yaitu komunikasi publik lembaga pasca integrasi.

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dipilih untuk dapat mendeskripsikan implementasi peran *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan yaitu mengomunikasikan informasi terkait lembaga melalui kanal media, pasca integrasi. Menurut Ardianto (2011), metode deskriptif kualitatif berfokus pada observasi atau pengamatan objek atau fenomena yang alami, peneliti berperan sebagai seorang yang mengamati dengan cara turun langsung ke lapangan. Maka, data yang diperoleh dalam penelitian deskriptif kualitatif tidak diperoleh dari pengukuran statistik.

Metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apa adanya realitas di lapangan, yang menjadi objek penelitian, kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Abdussamad (2021) bahwa pada metode deskriptif kualitatif, peneliti harus menjelaskan makna dari data atau fenomena yang telah diperoleh, dibuktikan dengan menunjukkan catatan lapangan.

Metode ini digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan dan mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi peran *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan yaitu mengomunikasikan informasi terkait lembaga pasca integrasi. Sehingga, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian empat peranan humas dari data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian kalimat.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan dengan bentuk kata-kata atau deskriptif, tidak berbentuk statistik angka. Data hasil penelitian diperoleh dari proses observasi, wawancara, serta catatan dari hasil pengamatan maupun informasi resmi dari lembaga. Seperti yang dijelaskan Nuryadi (2017:3) bahwa data kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi humas, yang berlandaskan konsep 4 peran humas Broom dan Dozier, yaitu teknisi komunikasi (*communication technician*), fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), fasilitator pemecah masalah (*problem solving facilitator*), dan penasihat ahli (*expert prescriber*).

2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama sebagai alat untuk menyusun hasil penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data utama adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi, sesuai dengan fakta yang didapat. Menurut Haryoko dan Bahartiar (2020:122), data primer mencakup informasi dan fakta yang relevan dengan penelitian, yang menjadi penentu utama dalam proses analisis penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang telah dipilih sebelumnya, yaitu individu-individu yang memahami dan menjalankan fungsi kehumasan dengan empat peran humas sebagai implementasi *government public relations* di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari informan pada saat proses wawancara, yang dikumpulkan sebagai data pelengkap dalam proses analisis. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari sumber tambahan seperti dari laporan berita, artikel, media sosial, serta sumber literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian, dan dapat mendukung data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Seperti yang disampaikan oleh Ruslan (2019:30) bahwa data sekunder dihimpun dari data yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi yang di terbitkan oleh organisasi atau perusahaan.

1.6.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam sebuah penelitian, informan adalah seseorang yang mempunyai informasi serta data terkait fenomena dan objek yang diteliti, yang akan dimintai

informasi mengenai objek penelitian. Penelitian ini menentukan informan sebagai sumber data berdasarkan tugas dan peran sesuai dengan bagian yang akan diteliti oleh peneliti.

Pemilihan informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi akurat terkait situasi dari objek penelitian, melaksanakan, serta memahami implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi humas yaitu komunikasi publik, serta informasi yang lengkap mengenai objek penelitian. Maka ditentukan informan dalam penelitian ini:

- 1) Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mengetahui dan menjalankan fungsi kehumasan, sejalan dengan empat peran humas.
- 2) Pranata Humas di Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang mengetahui dan menjalankan fungsi kehumasan, sejalan dengan empat peran humas.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian, agar tujuan penelitian dapat tercapai, dengan standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara secara mendalam.

1) Observasi Partisipatori Pasif

Observasi adalah aktivitas yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena, adapun dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatori pasif. Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti, adalah dengan

mengamati atau meninjau kegiatan, dan observasi digital melalui internet. Menurut Spradley (2020:152), observasi adalah proses pencatatan yang sistematis dengan mengamati atau merekam peristiwa, perilaku, dan benda di lingkungan objek penelitian berlangsung. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pada observasi, peneliti harus menjaga jarak agar pengamatan fenomena sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatori pasif sebagai teknik pengumpulan data, karena peneliti tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mendatangi langsung ke objek penelitian, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melihat fakta dan realita, yang bertujuan agar data yang diperoleh nyata dan jelas mengenai implementasi *government public relations* Badan Riset dan Inovasi Nasional pasca integrasi dalam menjalankan fungsi kehumasan yaitu komunikasi publik lembaga.

2) Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, berupa proses tanya jawab antara peneliti dengan informan, serta pertukaran informasi dengan informan dalam mengartikan suatu fenomena yang diteliti secara mendalam. Menurut Mulyana (2006:183-184), pada pelaksanaan wawancara mendalam, peneliti berupaya memahami dengan mendalami psikologis dan sosial informan, karena sifat pengumpulan data ini dilakukan secara terbuka. Teknik ini menjelaskan bahwa, wawancara mendalam tidak memiliki pedoman khusus, peneliti akan berusaha mengarahkan wawancara agar sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), dengan bertatap muka secara langsung bersama informan yaitu staf Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan bagian Humas, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan untuk menggali informasi secara menyeluruh tentang implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan pasca integrasi. Melalui wawancara mendalam, peneliti berinteraksi langsung dengan informan yang memiliki tanggung jawab terkait, serta memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui observasi.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk melakukan pengolahan, serta penyusunan informasi dengan terstruktur, yang dikategorikan untuk menghasilkan hasil penelitian. Creswell (2016:264) menjelaskan bahwa proses analisis data dibutuhkan untuk membantu memahami data dalam suatu penelitian, diantaranya:

1) Mengolah dan Menyiapkan Data

Tahap ini merupakan proses menyimpan data penelitian dengan mencatat seluruh data dan informasi yang ditemukan dari proses penelitian. Kemudian mengolah serta menyusun data sesuai dengan jenis-jenis yang didapat dari informan, yang dikelompokkan berdasarkan implementasi *government public relations* BRIN.

2) Membaca dan Mengartikan Seluruh Data

Tahap ini dilakukan dengan mengartikan data-data yang telah diperoleh, dan memperoleh pemahaman makna terkait implementasi *government public relations*

yang dijalankan BRIN. Pembacaan seluruh data dilakukan untuk membantu dalam memahami hubungan setiap data yang telah disusun sesuai jenis data.

3) Melakukan *Coding* atau Pemberian Kode pada Seluruh Data

Tahap ini merupakan pengorganisasian data untuk memperoleh pemahaman umum terkait implementasi *government public relations* BRIN. Pengelompokan dilakukan dengan memberikan kode pada data yang memiliki kesamaan dari hasil wawancara dan observasi, maupun informasi pendukung lainnya, serta sejalan dengan batasan penelitian.

4) Penyusunan Proses *Coding*

Tahap ini merupakan penyusunan makna dan proses mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan konsep empat peran humas pada data yang telah di telah dikelompokkan sebelumnya. Pada tahap ini, identifikasi tema dilakukan untuk merepresentasikan informasi terkait fungsi kehumasan melalui implementasi *government public relations* BRIN.

5) Menyajikan Data

Tahap penyajian data ini umumnya menggunakan narasi dalam memaparkan temuan. Deskripsi dalam memaparkan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk mengetahui implementasi *government public relations* BRIN dalam menjalankan fungsi kehumasan sesuai dengan empat peran humas.

6) Menginterpretasi Makna berdasarkan Data

Tahap terakhir analisis ini dilakukan dengan memaknai setiap data yang ditemukan sebagai jawaban dari temuan penelitian. Peneliti memberikan penafsiran dengan mengaitkan hasil analisis data dengan konsep empat peran humas. Kesimpulan yang diperoleh berfokus pada fungsi kehumasan yang dijalankan melalui implementasi *government public relations* BRIN.

